

Dinamika Pelaksanaan Pemilu di Kota Jambi pada Era Reformasi 1999 dan 2004

Zulfadhli Al Kausar¹, Irhas Fansuri Mursal^{2*}, Fatonah Fatonah³, Gusmira Wita⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jambi

⁵Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: irhas.fansuri@unja.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika pelaksanaan Pemilu 1999 dan 2004 di Kota Jambi sebagai tonggak transisi sistem demokrasi dari era Orde Baru ke masa Reformasi. Pemilu tahun 1999 menandai awal keterbukaan politik dan meningkatnya partisipasi masyarakat, sedangkan Pemilu 2004 menegaskan peran pemilih melalui pemilihan presiden secara langsung. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan sejarah kualitatif dengan studi pustaka dan dokumentasi arsip lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pemilu tersebut memiliki dampak besar terhadap demokratisasi lokal, pergeseran pola partisipasi, dan perubahan sistem pemilu. Implikasinya terlihat dalam meningkatnya kesadaran politik warga dan penguatan institusi penyelenggara pemilu.

Kata Kunci: Demokrasi, Jambi, Pemilu, Reformasi, Sejarah Politik.

Abstract

This article examines the dynamics of the 1999 and 2004 elections in Jambi City as milestones in the transition from the New Order era to the Reform era. The 1999 election marked the beginning of political openness and increasing public participation, while the 2004 election emphasized the voters' role through the first direct presidential election. This study uses a qualitative historical approach supported by literature review and local archival documentation. The results show that both elections significantly impacted local democratization, shifts in participation patterns, and electoral system reforms. These developments increased political awareness among citizens and strengthened electoral institutions.

Keywords: Democracy; Election; Jambi; Political History; Reform.

How to Cite: Al Kausar, Z. et al. (2025). Dinamika Pelaksanaan Pemilu di Kota Jambi pada Era Reformasi 1999 dan 2004. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 2(2), 91-103.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi, dimana rakyat diberi kesempatan untuk secara langsung memilih wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yang ditandai dengan perubahan sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis. (Gaffar, Demokrasi dan pemilu di Indonesia). Kota Jambi sebagai bagian dari daerah otonom di Indonesia mengalami dampak langsung dari perubahan sistem pemilu ini. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dinamika pelaksanaan pemilu pada masa transisi tersebut, khususnya dalam konteks lokal Kota Jambi pada tahun 1999 dan 2004. Dengan membandingkan pelaksanaan kedua pemilu tersebut, diharapkan dapat diketahui sejauh mana perubahan sistem politik nasional berdampak pada dinamika politik lokal.

Pada masa Reformasi, dunia pers mengalami kemajuan yang pesat, khususnya dalam aspek kebebasan berkespresi. Praktik pemberedelan terhadap media tidak lagi terjadi. Pers tampil lebih berani dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah, tanpa rasa takut terhadap regulasi, sanksi, ataupun keberadaan organisasi profesi mereka. (Mursal,IF, 2021). Sehingga proses sosialisasi dan informasi tentang Pemillu dan pesta demokrasi pada masa Reformasi cenderung lebih terbuka dan dapat diakses lewat Media Lokal ataupun Nasional.

Pemilihan umum merupakan gerakan penting yang mencerminkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan demokratis. Di Indonesia, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme memilih wakil rakyat, tetapi juga mencerminkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terus berkembang, terutama sejak era reformasi. Dalam konteks ini, pemilu menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem politik yang demokratis, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di Provinsi Jambi, pasca-reformasi ditandai dengan perubahan signifikan, termasuk peningkatan jumlah kabupaten dari 5 menjadi 9 serta 1 kota, yang mencerminkan kemajuan administratif dan desentralisasi pemerintahan. (Harian Independent 18 Juli 1999)

Untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan bersih, berbagai langkah pembenahan dilakukan, mulai dari perombakan sistem pemilu, peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran, hingga mendorong partisipasi masyarakat dan pengawasan independen. Di Jambi, pengawasan dilakukan oleh lembaga resmi seperti Panitia Pengawas Pemilu (Pawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD),

yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknis pemilu. Selain itu, peran organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media lokal seperti Jambi Ekspres dan Tribun Jambi juga penting dalam mengedukasi masyarakat serta mengawasi jalannya proses demokrasi secara kritis. (wawancara Wein Arifin).

Penulis ini mendalami tentang dinamika pelaksanaan pemilihan umum masa reformasi di Kota Jambi 1999 dan 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada bagaimana Kondisi politik Jambi awal Reformasi, pelaksanaan pemilu legislatif masa reformasi 1999 dan 2004 di kota Jambi, dan dinamika pemilu tahun 1999 dan 2004 di kota Jambi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari empat tahapan utama: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data yang digunakan meliputi sumber primer seperti kliping surat kabar lokal sezaman, laporan KPU, dokumentasi arsip, serta wawancara dengan narasumber seperti anggota Panwaslu dan KPU Kota Jambi. Selain itu, digunakan juga sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data-data tersebut dalam konteks perkembangan politik lokal pada era reformasi.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pemilu 1999 di Kota Jambi mencerminkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap perubahan politik nasional. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai dan menandai awal era multipartai yang sebenarnya. Kota Jambi mencatat partisipasi pemilih yang signifikan, dengan dukungan kuat terhadap partai reformis seperti PDI Perjuangan. Sementara itu, Pemilu 2004 memperkenalkan sistem pemilihan presiden langsung dan penyederhanaan partai politik menjadi 24 peserta. Pemilu ini memperlihatkan peningkatan dalam hal keterlibatan masyarakat, profesionalisme penyelenggara, serta penyempurnaan sistem teknis pelaksanaan. Kedua pemilu ini menjadi tonggak penting dalam demokratisasi di Kota Jambi. (Amin Suprihatini, 2008. Pemilu dari Masa ke Masa)

Dinamika Pelaksanaan Pemilu di Kota Jambi pada Era Reformasi: Studi Kasus Pemilu 1999 dan 2004 Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia

memasuki babak baru demokratisasi yang ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu 1999 sebagai pemilu pertama di era reformasi. Kota Jambi turut mengalami perubahan signifikan dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini, baik dari sisi persiapan, partisipasi masyarakat, maupun pengawasan pemilu. (Agustino, 2006; Harian Independent, 8 Juni 1999).

Pada masa Orde Baru, pemilu dilaksanakan dalam atmosfer yang terkendali dengan dominasi Partai Golkar dan minimnya ruang oposisi (Aspinall, 2005). Namun di era reformasi, situasi berubah drastis. Pemilu 1999 dilaksanakan dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Partai-partai yang sebelumnya dibungkam kini diberi ruang untuk berkompetisi, termasuk di Kota Jambi. (Agustino, 2006).

PDI Perjuangan tampil sebagai kekuatan baru dengan kampanye meriah di berbagai daerah, termasuk di Lapangan Sengeti, Batanghari. Tokoh-tokoh seperti Umrin Eri dan Agnita Singedekane menyuarakan semangat perubahan dan mengajak masyarakat mendukung visi Megawati Soekarnoputri. (Harian Independent, 8 Juni 1999). Kampanye mereka mencerminkan antusiasme rakyat akan perubahan dan harapan akan pemerintahan yang lebih adil.

Sementara itu, Partai Golkar mencoba menyesuaikan diri dengan semangat reformasi dengan mengusung visi masyarakat madani, demokratis, dan terbuka. Mereka menyuarakan pentingnya kebebasan berpendapat, keterbukaan politik, dan keadilan sosial sebagai bagian dari transformasi menuju demokrasi yang lebih sehat. (Harian Independent, 31 Mei 1999).

Penyelenggaraan Pemilu 1999 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru dibentuk, didukung oleh struktur organisasi hingga ke tingkat lokal. Proses ini diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslak). Meskipun persiapannya tergolong singkat, pemilu berlangsung tertib dan sesuai jadwal, kecuali di beberapa wilayah lain di Sumatera yang mengalami keterlambatan logistik. (KPU RI, 1999).

Partisipasi masyarakat Kota Jambi cukup tinggi. Edukasi politik dilakukan oleh berbagai pihak untuk membantu warga memahami sistem pemilu multipartai yang baru. Hadirnya partai-partai baru seperti PKB menambah warna dan dinamika politik di daerah. (Harian Jambi Ekspers 4 Januari 1999).

Pemilu 2004 menjadi tonggak konsolidasi demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Persiapan lebih matang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, seperti melalui sosialisasi (Veri Junaidi. 2013). Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu secara bermakna, bukan hanya sebagai rutinitas lima tahunan.

Kehadiran masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menunjukkan semangat yang tinggi. Banyak TPS didekorasi meriah, bahkan menyerupai pesta rakyat, lengkap dengan tenda, umbul-umbul, dan bendera merah putih. Hal ini mencerminkan bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal partisipasi, gotong royong, dan semangat bersama. Selain partisipasi, pengawasan pemilu juga diperkuat. Lembaga seperti KPU dan organisasi masyarakat sipil berperan dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang bebas dari politik uang, intimidasi, dan pelanggaran lainnya. (Harian Independent Jambi 8 Juni 1999)

Pemilihan Umum di Kota Jambi selama era reformasi mencerminkan pergeseran besar dalam sistem politik Indonesia dari otoritarianisme menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Dua pemilu penting, yakni Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, menjadi tonggak dalam proses ini, menandai era baru partisipasi rakyat secara langsung dalam menentukan wakil dan pemimpin mereka. (Harian Independent, 1999,2004; Budiardjo, 2008).

Pemilu 1999 merupakan pemilihan legislatif dan presiden pertama di Indonesia yang diselenggarakan secara bebas dan demokratis setelah runtuhnya Orde Baru. Di Kota Jambi, pemilu ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat. Berbagai lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan organisasi sipil aktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pemilih terhadap sistem multipartai dan prosedur baru, termasuk penggunaan banyak surat suara. (Sigit Pamungkas, 2005).

Partisipasi masyarakat sangat besar, ditandai dengan lengangnya pusat-pusat ekonomi dan jalanan kota pada hari pemungutan suara, karena hampir seluruh warga mendatangi TPS. Tidak hanya mencoblos, warga juga aktif mengikuti penghitungan suara. Ini menandakan tingginya kesadaran politik masyarakat dalam mengawal demokrasi yang jujur dan transparan. (Sigit Pamungkas, 2005).

Namun, pelaksanaan pemilu tidak lepas dari tantangan. Laporan pemantauan oleh KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) sempat menimbulkan ketegangan dengan Panwaslu setempat terkait dugaan pelanggaran. Di daerah Sarolangun Bangko, muncul pula kasus penyalahgunaan identitas oleh oknum yang mengaku sebagai anggota KIPP. Meski demikian, proses klarifikasi dan pengawasan tetap dijalankan, menunjukkan dinamika penguatan institusi pemilu. (Harian Independent 1999)

Pelaksanaan pemilu pun dirayakan sebagai pesta rakyat. Banyak TPS dihias meriah, bahkan menyerupai dekorasi pesta pernikahan. Aksi ini menggambarkan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam menjaga demokrasi.

(Harian Independent 5 April 2004). Namun, potensi kecurangan tetap menjadi perhatian. Panwaslu menerapkan strategi seperti “Gerakan Pengawas Keliling” untuk mengawasi proses pemilihan presiden (Pilpres) dan mencegah pelanggaran. Upaya ini menjadi langkah preventif dalam menciptakan pemilu yang lebih jujur dan tertib. (Harian Independen 5 Juli 2004)

Peta kekuatan politik Pasca-Reformasi: Pemenang Pemilu 1999 dan 2004 di Kota Jambi. Sejak tumbanganya Orde Baru pada 1998, Kota Jambi mengalami dinamika politik yang signifikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilu yang berlangsung setelah reformasi tidak hanya menjadi ajang kompetisi antarpolitical, tetapi juga menjadi barometer pergeseran orientasi politik masyarakat. Dua pemilu penting, yakni tahun 1999 dan 2004, menggambarkan perubahan besar dalam konstelasi kekuatan partai politik di Kota Jambi. (Amin Suprihatini, 2008). Hasil pemilu dua periode ini menjadi gambaran dan barometer kekuatan partai politik politik di Kota Jambi.

Dominasi Golkar dan Kemenangan PDI-P pada Pemilu 1999. Pemilu 1999 menjadi titik awal transisi demokrasi dengan sistem multipartai yang lebih terbuka. Di Kota Jambi, pemilu ini menjadi momentum penting bagi partisipasi masyarakat untuk menentukan wakil rakyat secara langsung, bebas dari tekanan pemerintah seperti pada masa Orde Baru. (Komisi Pemilihan Umum)

Dalam pemilu ini, PDI Perjuangan tampil sebagai partai dengan suara terbanyak secara nasional dan juga unggul di Kota Jambi, mengantongi 69.717 suara untuk DPRD Provinsi (DPRD I) dan 71.501 suara untuk DPRD Kota (DPRD II). Namun, Partai Golkar tetap menjadi kekuatan dominan dengan 55.674 suara (DPRD I) dan 56.778 suara (DPRD II), berhasil menempatkan banyak wakilnya di parlemen lokal meski kehilangan banyak kursi secara nasional dibandingkan Pemilu 1997. (Harian Independent 13 Juni 1999)

Partai-partai lain seperti PPP, PAN, PKB, dan PKP juga meraih suara cukup signifikan, menandakan kemunculan kekuatan politik baru pasca-reformasi. Di sisi lain, partai-partai kecil tetap menunjukkan keterlibatan dalam demokrasi meski hanya memperoleh sedikit suara. Pemilu 2004: Pilkada Langsung munculkan kekuatan baru dalam peta politik Kota Jambi. Pemilu 2004 membawa perubahan besar dengan diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung untuk pertama kalinya. Ini mencerminkan konsolidasi demokrasi yang lebih kuat di tingkat lokal, termasuk di Kota Jambi. (Amin Suprihatini, 2008)

Partai Golkar tetap menjadi partai terkuat dengan meraih 316.039 suara dan memperoleh 2 kursi DPR, diikuti oleh PAN dengan 224.825 suara (1 kursi) dan PDI Perjuangan dengan 142.588 suara (1 kursi). Partai Demokrat, yang baru pertama kali mengikuti pemilu, langsung mencuri perhatian dengan 73.824 suara, meraih 1 kursi. PKS dan PPP juga masing-masing memperoleh 1 kursi. (Laporan KPU 2004)

Munculnya Partai Demokrat dan meningkatnya kekuatan PAN menunjukkan adanya pergeseran preferensi pemilih, terutama dari kalangan muda dan profesional. Sosok Amien Rais sebagai tokoh reformasi turut mendongkrak citra PAN, ditambah pengaruh kuat dari Gubernur Jambi saat itu, Zulkifli Nurdin, yang juga Ketua DPW PAN Jambi. Basis PAN yang tersebar hingga tingkat desa memperkuat upaya partai untuk merebut pengaruh politik lokal. (Harian Independent, 2004).

Tingkat Partisipasi dan Implikasi Politik. Partisipasi masyarakat Kota Jambi dalam Pemilu 2004 cukup tinggi, dengan lebih dari 70% pemilih menggunakan hak suaranya. Kampanye yang terbuka dan kompetitif menciptakan ruang dialog politik yang sehat dan demokratis. Pemilu ini menandai pergeseran dari pemilu administratif ke pemilu partisipatif. (Harian Independent 2004)

Berdasarkan data KPU 2004, terdapat 24 partai peserta yang diverifikasi. Hasil perolehan suara secara umum menunjukkan bahwa kekuatan politik menjadi lebih menyebar, meskipun dominasi Golkar tetap terlihat. Keberhasilan partai-partai baru menembus DPRD menjadi sinyal penting bagi demokrasi yang semakin terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat. (Penyelenggara Pemilu 2004).

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 menandai era baru demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Pemilu ini merupakan pemilu legislatif pertama setelah tumbanganya Orde Baru, dan mencerminkan semangat reformasi yang menyapu seluruh aspek kehidupan politik nasional. Di tengah transisi dari sistem otoriter ke demokrasi, masyarakat Kota Jambi menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyambut pesta demokrasi ini. (Penyelenggara Pemilu 1999).

Reformasi dan Keterbukaan Politik Baru. Dalam konteks nasional, Pemilu 1999 menjadi tonggak penting karena dilaksanakan dengan sistem multipartai yang terbuka. Sebanyak 48 partai politik mengikuti kontestasi, setelah lolos dari seleksi administratif yang ketat. Keterlibatan partai-partai baru mencerminkan terbukanya ruang demokrasi dan partisipasi politik. Selain itu, penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya dikelola LPU beralih ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lebih independen, sekaligus mengurangi intervensi pemerintah pusat dalam proses politik. (Penyelenggara Pemilu 1999).

Pemilihan Umum di Kota Jambi menggambarkan antusias masyarakat untuk memilih. Sejak pagi, warga dari berbagai latar belakang berbondong-bondong mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Aktivitas ekonomi di kota nyaris terhenti, pasar dan toko-toko besar tutup, jalan-jalan protokol lengang, bahkan Bandara Sultan Thaha pun sepi. Fenomena ini menunjukkan tingginya partisipasi dan kesadaran politik warga terhadap pentingnya pemilu sebagai sarana perubahan. (Harian Independent 8 Juni 1999)

Kemenangan PDI Perjuangan menggambarkan perubahan peta politik di Kota Jambi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) muncul sebagai pemenang mutlak di Kota Jambi, memperoleh 69.717 suara untuk DPRD Provinsi dan 71.501 suara untuk DPRD Kota. Kemenangan ini tidak lepas dari kuatnya dukungan masyarakat terhadap figur Megawati Soekarnoputri dan semangat perubahan yang diusung partai tersebut. Kampanye "Mega Merahkan Jambi" menjadi simbol emosional dan ideologis perlawanan terhadap warisan Orde Baru, dengan mobilisasi massa hingga 20.000 orang di Batanghari. (Harian Independent 4 Juni 1999)

Sementara itu, Partai Golkar tetap menunjukkan kekuatan meski tidak lagi dominan seperti era sebelumnya. Partai lain seperti PAN dan PPP juga memperoleh suara signifikan, mencerminkan hadirnya kekuatan Islam politik dan reformis di wilayah ini. Sistem pemilu yang digunakan saat itu adalah proporsional tertutup, di mana rakyat mencoblos lambang partai, bukan nama calon legislatif. Tantangan pelaksanaan dan partisipasi masyarakat cukup besar dari persentase pemilih. Pemilihan berlangsung tertib dan aman, tidak semua warga terlibat aktif. Sekitar 10% pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena berbagai kendala seperti kurangnya informasi, tidak menerima undangan memilih (C6), hingga hambatan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa meski antusiasme tinggi, masih ada ruang untuk perbaikan dalam pemenuhan hak konstitusional warga. (Harian Independent 1999)

Disisi pengawasan, Panwaslu Kota Jambi mencatat berbagai pelanggaran administratif, khususnya pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan, serta kampanye terselubung di masa tenang. Meski tidak sampai menimbulkan konflik besar, pelanggaran ini menunjukkan tantangan dalam menjaga prinsip keadilan dan keteraturan dalam pelaksanaan pemilu yang jujur dan demokratis. (Harian Independent 2004).

Dinamika Pemilu Legislatif 2004 di Kota Jambi: Penguatan Demokrasi dalam Pemilihan Langsung

Pemilu 2004 merupakan babak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Untuk pertama kalinya, masyarakat Indonesia secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden, sebuah langkah besar hasil dari amandemen UUD 1945. Selain pemilu presiden, pemilihan legislatif juga mengalami perubahan sistem, dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka, di mana pemilih mencoblos langsung nama calon legislatif (caleg) yang mereka pilih. (Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2004.)

Persiapan pemilu di Kota Jambi melibatkan kerja sama antara KPU daerah, pemerintah kota, dan lembaga sipil. Fokus utama adalah verifikasi dan validasi daftar pemilih agar setiap warga yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi. Meski sempat terkendala distribusi logistik di beberapa kelurahan, pelaksanaan berjalan relatif tertib. Kinerja petugas KPPS dan strategi seperti “gerakan pengawas keliling” dari Panwaslu menunjukkan adanya peningkatan keseriusan dalam menjaga integritas pemilu. (Penyelenggara Pemilu 2004; Harian Independent 2004)

Antusiasme masyarakat juga meningkat. Diskusi politik hidup di berbagai ruang sosial, dari warung kopi hingga ruang kelas. Masyarakat tidak lagi pasif, melainkan mulai aktif mendiskusikan visi partai, calon legislatif, hingga rekam jejak tokoh nasional. Ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran demokrasi yang lebih matang dibandingkan pemilu sebelumnya. (Harian Independent 2004).

Pemilu legislatif 2004 diselenggarakan pada 5 April, lebih dahulu dari pemilu presiden. Masyarakat memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD. DPR dipilih berdasarkan daftar partai dan nomor urut caleg, sementara DPD dipilih secara langsung tanpa keterikatan partai (independen). Jumlah partai politik peserta berkurang dari 48 pada tahun 1999 menjadi 24 partai pada 2004, yang mencerminkan hasil seleksi administratif oleh KPU. (Amin Suprihatini, 2008). Seleksi alam dalam demokrasi terbuka terjadi dari kesiapan anggota, struktur, dan logistik untuk menjalankan mesin partai politik.

Pemilu di Kota Jambi sendiri, terdapat 16 partai politik yang ikut serta dalam pemilihan anggota DPRD Kota. Nama-nama calon dari berbagai partai terpampang jelas dalam daftar, menandakan terbukanya peluang representasi politik dari berbagai latar belakang. Laporan pelanggaran dan evaluasi proses demokrasi berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaan pemilu tidak lepas dari permasalahan. Di berbagai daerah, termasuk Jambi, muncul laporan dugaan pelanggaran seperti manipulasi suara, tidak

netralnya aparat, serta pelanggaran etik dan administratif oleh penyelenggara. Salah satu sorotan terjadi di TPS RSUD Raden Mattaher, dimana proses pemungutan suara berlangsung tanpa kehadiran saksi dari partai politik, memunculkan kekhawatiran akan transparansi proses. (Harian Jambi 2004). Proses pemilihan tetap berlangsung sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Demonstrasi mahasiswa di Kota Jambi pun menuntut transparansi dan penegakan hukum atas berbagai pelanggaran yang dinilai mencederai keadilan dan demokrasi. Panwaslu menanggapi dengan menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti laporan serta mendorong evaluasi menyeluruh agar pemilu mendatang lebih akuntabel. (Harian Independent 2004). Mahasiswa sebagai kelompok *middle class* menjadi bagian yang ikut mengawal pesta demokrasi di Kota Jambi.

Tahapan Pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kota Jambi: Dari Sentralisasi ke Demokrasi Langsung

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Kota Jambi mengalami transformasi besar seiring dengan perubahan politik nasional, dari masa Orde Baru yang otoriter menuju era Reformasi yang demokratis. Setiap tahapan pelaksanaan mencerminkan perubahan struktur kekuasaan, peran lembaga, dan partisipasi masyarakat. (Harian Jambi Ekspres April 2004).

Selama masa Orde Baru, pelaksanaan pemilihan legislatif di Kota Jambi sangat terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Golkar sebagai partai dominan hampir selalu memenangkan pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sistem politik yang dikembangkan lebih mengutamakan stabilitas dan pengendalian, dengan ruang partisipasi politik yang terbatas. Prosedur pemilu dikontrol ketat, dan masyarakat hanya memiliki ruang kecil untuk menyalurkan aspirasi politik secara bebas. (Aspinall & Mietzner, 2010).

Tahapan pemilu di Kota Jambi berjalan dengan baik dengan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. KPU setempat melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam sosialisasi pemilu, dan partisipasi pemilih meningkat secara signifikan. Meskipun ada tantangan seperti tidak semua pemilih terdaftar secara resmi, suasana demokratis mulai terasa, menunjukkan pergeseran dari sistem yang kaku menuju proses politik yang lebih terbuka. (Departemen Dalam Negeri RI, 2000; Harian Jambi Ekspres, 1999). Pemilu 2004 mencatat sejarah baru dengan diselenggarakannya pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara langsung. Pada 5 April 2004, rakyat memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan pemilihan presiden dilakukan dalam dua putaran -

putaran pertama pada 5 Juli dan putaran kedua pada 20 September 2004. (Komisi Pemilihan Umum, 2004).

Jumlah partai peserta berkurang drastis menjadi 24 partai, menunjukkan adanya penyaringan dan perbaikan sistem verifikasi. Di Kota Jambi sendiri, hanya 16 partai yang terlibat dalam pemilihan anggota DPRD Kota. Sistem proporsional terbuka mulai diterapkan, dimana masyarakat mencoblos langsung nama calon legislatif, tidak lagi hanya simbol partai. Ini memperkuat hubungan antara pemilih dan wakil yang mereka pilih. (KPU Provinsi Jambi, 2004). KPU Kota Jambi memimpin persiapan teknis dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi pemilih. Sementara itu, Panwaslu memainkan peran penting dalam pengawasan dan distribusi logistik. Meskipun sempat dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan logistik, pelaksanaan berjalan lancar tanpa pemilu susulan. (KPU Kota Jambi, 2004).

Panwaslu juga mengantisipasi potensi masalah seperti pemilih tidak terdaftar dan kemungkinan terjadinya protes pada hari pemungutan suara. Strategi pencegahan seperti penjelasan dini kepada warga yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap, serta kesiapsiagaan aparat keamanan menjadi langkah penting dalam menjaga kelancaran pemilu. (Harian Independent 2004).

Partisipasi pemilih di Kota Jambi pada Pemilu 2004 cukup tinggi, menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Meskipun pelaksanaan tidak lepas dari permasalahan seperti TPS tanpa saksi partai atau laporan manipulasi, secara umum, proses berjalan dengan semangat demokrasi yang lebih kuat dibandingkan masa sebelumnya. (Harian Independent 2004).

Kesimpulan

Pemilu 1999 dan 2004 di Kota Jambi menunjukkan dinamika demokrasi yang berkembang di tingkat lokal. Pemilu 1999 menjadi awal keterlibatan masyarakat secara luas dalam pemilihan umum yang demokratis, sementara Pemilu 2004 memperkuat sistem demokrasi dengan pemilihan presiden langsung dan penyederhanaan partai politik. Dari pelaksanaan kedua pemilu tersebut, terlihat bahwa partisipasi masyarakat meningkat, sistem pemilu lebih transparan, dan peran lembaga seperti KPU dan Panwaslu semakin signifikan. Perbandingan keduanya menunjukkan adanya kemajuan dalam sistem politik lokal yang mencerminkan semangat reformasi nasional.

Secara umum, kondisi politik di Jambi pasca-reformasi ditandai oleh peralihan dari sistem otoritarian ke sistem yang lebih demokratis, peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik, serta tantangan baru dalam hal desentralisasi dan dinamika

politik lokal. Meskipun ada kemajuan dalam hal kebebasan berpolitik, politik dinasti, korupsi, dan ketegangan sosial tetap menjadi isu yang perlu dihadapi dalam pembangunan politik di Provinsi Jambi.

Pada masa reformasi, persiapan Pemilu di Kota Jambi mengalami perubahan signifikan yang mencerminkan pergeseran menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan langsung. Pemilu 1999, sebagai pemilu pertama pasca-Orde Baru, memulai perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, termasuk di Jambi. Masyarakat Kota Jambi mulai merasakan pentingnya hak suara mereka, dan partisipasi politik semakin meningkat. Namun, tantangan seperti politik uang, politik dinasti, dan pendidikan pemilih masih menjadi isu yang harus terus dihadapi dalam proses demokrasi yang berkembang.

Pelaksanaan Pemilu di Kota Jambi pada masa reformasi mencerminkan pergeseran besar dalam sistem politik Indonesia, dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan Pemilu di Kota Jambi pada masa reformasi mencerminkan transisi menuju demokrasi yang lebih inklusif dan terbuka, meski masih ada tantangan yang perlu diatasi. Pemilu yang dilaksanakan dengan sistem multipartai dan Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam proses politik. Meskipun masih ada tantangan seperti politik uang, politik dinasti, dan keterbatasan pendidikan politik, pemilu di Kota Jambi pada era reformasi menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, serta menguatnya peran media dan lembaga pengawas. Di masa depan, penguatan kualitas demokrasi, pendidikan politik yang lebih baik, dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci dalam memastikan Pemilu di Kota Jambi dapat berjalan dengan adil dan berkualitas. Pemilu 1999 dipilih langsung oleh rakyat, namun dalam format memilih partai politik, bukan calon legislatif individu. Sistemnya proporsional tertutup rakyat mencoblos simbol partai, bukan nama calon. Pemilu 2004 dipilih langsung oleh rakyat partai dan individu calon legislatif. Sistemnya proporsional terbuka rakyat mencoblos nama caleg langsung.

Daftar Pustaka

- Amin Suprihatini, 2008. *Pemilu dari Masa ke Masa*, Jakarta. Penerbit: Cempaka Putih.
Penyelenggara Pemilu 2004 Adalah KPU, Pahami Pelaksanaan dan Hasilnya, Diakses pada 22 Januari 2025.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5514661/penyelenggara-pemilu-2004-adalah-kpu-pahami-pelaksanaan-dan-hasilnya>

- Harian Jambi Ekspres. (1999, 8 Juni). Pelaksanaan Pemilu di Jambi Berjalan Kondusif. Jambi.
- Komisi Pemilihan Umum, diakses pada tanggal 4 mei 2025, <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Liddle, William R., & Mujani, Saiful. (2005). *Transisi Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Reformasi Politik dan Politik Pemilu*. *Journal of Asian Studies*, 64(4), 793-813.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. (2008). *Membangun Lanskap Politik Indonesia: Perspektif Seorang Pemimpin*. Jakarta: Yayasan SBY.
- Turbiner, Daniel. (2012). *Pemilu Legislatif Indonesia 1999: Sebuah Evaluasi*. *Journal of Southeast Asian Politics*, 45(1), 15-29.
- MacRae, Duncan. (2010). *Hukum Pemilu dan Politik di Indonesia*. *Southeast Asian Studies*, 47(3), 292-310..
- Mursal, Irhas Fansuri dan Gusmira Wita. (2021). Majalah Sabili: Transisi Orde Baru Ke Reformasi (1985-2000), *Jurnal Mukadimah*, 5(1): 111-122. <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3503>
- Nugroho, Rudi. (2011). *Sistem Pemilu Indonesia: Studi Perbandingan tentang Reformasi Pemilu dan Perwakilan Politik*. Routledge.
- Sigit Pamungkas. (2005). "Dinamika Pemilu 1999 di Indonesia: Studi Kasus di Kota Jambi." *Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 45-60.
- Susilastuti, dkk. 2016. *Pengantar Ilmu Politik Membedah Paradigma Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan (UPN).
- Veri Junaidi. 2013. "Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu," diakses pada tanggal 04 mei 2025, Pelibatan dan partisipasi masyarakat PDF copied from the Internet by Library of Congress Jakarta Office on 3/5/2018.
- Komisi Pemilihan Umum. (2004). *Laporan Umum Pemilihan Umum 2004*. Jakarta: KPU RI.
- Wahid, Abdurrahman. (2002). *Politik Orde Baru Indonesia dan Gerakan Reformasi*. *Harvard University Press*.
- Waridah, dkk. 1995. *Sejarah Nasional dan Umum*. Yogyakarta: Bumi Aksara.